



Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015

Kamaluddin Ahmad¹, Ongki²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: kamaludin@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: ongki63@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 13-
Februari-2019
Disetujui: 25-Maret-
2019

Kata Kunci:

peran
kepala desa
menyelesaikan
konflik
masyarakat

ABSTRAK

Abstrak: Pemicu utama adalah konflik perseorangan, karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi konflik antar daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor pemicu terjadinya konflik, dan mengetahui peranan Kepala Desa Renda dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan faktor pemicu terjadinya konflik antar masyarakat di Desa Renda, antara lain: a) kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah minuman keras; b) komunikasi yang kurang; c) adanya hiburan malam. Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar masyarakat di Desa Renda, yakni: a) konsiliasi, bentuk konsiliasi terjadi pada masyarakat politik. Lembaga parlementer yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok kepentingan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan; b) mediasi, Kepala Desa Renda dan tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama mendamaikan para pemuda yang berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, hal tersebut belum mampu mereda munculnya kembali konflik, dan; c) Pihak Kepolisian, kepala desa dan tokoh masyarakat menjadi penengah kelompok yang konflik. Daerah ini berangsur-angsur mulai aman, hal ini tidak lepas dari usaha dan kerja keras dari pemerintah setempat.

Abstract: *The main triggers are individual conflicts because, in the name of regional solidarity, the conflict continues to be a conflict between regions. The purpose of this research is to know the triggering factors of conflict and to know the role of the lace village head in conflict resolution. This research uses qualitative methods, determination of informant using purposive sampling. Methods of collecting data using observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. The results showed the triggering factors of conflict between people in the village of Renda, among others: a) lack of employment and liquor problems; b) less communication; c) Evening entertainment. The role of the village chief in the resolution of conflicts occurring between people in the village of Renda, namely: a) conciliation, a form of conciliation occurs in political society. The parliamentary institution in which there are various interest groups will lead to opposition; b) Mediation, the head of the lace village and the community leaders and the police have been doing cooperation reconciling the conflicting youths, but the peace they do is only limited to peace, it has not been able to subside the emergence of back conflicts, and; c) The police, village head and community leaders are the mediators of the conflict group. This area is gradually getting safe, it is not separated from the efforts and hard work of the local government.*

A. LATAR BELAKANG

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan

menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk

menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik [1]. Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain [2].

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya. Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya tidaklah demikian. Kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi

berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik. Penyebab konflik antar masyarakat bias dipengaruhi oleh kurangnya hubungan social dalam menghargai perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin sering dan mudahnya masyarakat kita meledak amarahnya tanpa diiringi dengan rasio dan akal sehat, sehingga amarah tersebut diselesaikan dengan cara anarkis yang berupa pembunuhan, perusakan bahkan pembantaian[3]. Penyebab konflik dapat berupa faktor politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis dan agama. Hanya saja, faktor ekonomi dan politik sering ditunjuk berperan paling dominan dibanding dua faktor yang disebut terakhir[4].

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan [5]. Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh [6].

Seperti halnya yang terjadi di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, konflik sering kali terjadi dimana-mana. Konflik terjadi di Desa Renda umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik komunitas yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat. Mendatangi dan menikam bahkan membunuh warga yang desanya sama dengan pelaku, akibat dari sikap keluarga korban pertama yang membabi buta kemudian memancing kemarahan warga desa lain (lawan), dan terjadilah konflik terbuka yang melibatkan seluruh warga.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan [7] bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 58 [7], serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan [7]. Dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik komunal ini berawal, namun dari banyak kasus yang terjadi di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima pemicu utama konflik ini adalah konflik perseorangan, namun karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi seolah-olah konflik antar daerah, selain kerugian material, konflik tersebut tidak jarang menjatuhkan korban jiwa. Konflik antar masyarakat yang terjadi di Desa Renda ini sangat begitu memprihatinkan, karena konflik ini sudah begitu lama, akan tetapi pemerintah setempat sepertinya kurang memperhatikan masalah ini. Terbukti perkelahian antar pemuda desa tersebut sering kali terjadi. Seharusnya pemerintah setempat lebih serius dalam menangani kasus tersebut. Masalahnya setiap konflik yang terjadi tidak jarang menimbulkan banyak kerugian. Peran pemerintah dalam hal ini sangat begitu dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat yang bertikai.

Dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik. Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b) mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; c) meredam potensi Konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini. Selain itu, cara penyelesaian konflik antar masyarakat dapat dilakukan melalui mediasi antar warga dengan pemerintah atau swasta. Upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan perusahaan swasta antara lain melakukan Negosiasi; Kosultasi; Mediasi; dan terakhir Arbitrasi[8]. Selain itu cara untuk menangani konflik, antara lain: a) Pengenalan. b). Diagnosis. c). Menepakati suatu solusi. d). Pelaksanaan. e). Evaluasi[9].

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peranan kepala desa terhadap Konflik yang terjadi di Desa Renda. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pemicu terjadinya konflik antara kelompok Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dan untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Renda dalam penyelesaian konflik antar masyarakat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenal, yaitu suatu jenis penelitian yang bersifat melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.

Sebagaimana menurut [10] bahwa metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah - masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat yang dilakukan langsung di lapangan kemudian didukung juga dengan penelitian pustaka.

Menurut Danzin dan Lincoln dalam [10] penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenal, yakni penyajian data dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Subjek Penelitian

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut didasari atas pendapat Nasution dalam [11] yang menyatakan bahwa: dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama.

Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang sangat penting, sebagai individu yang sangat penting, informasi merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkapkan permasalahan penelitian [12].

Teknik penentuan informan dalam penelitian adalah teknik purposive sampling. Menurut [13], pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri informan yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Menurut [14] dalam penelitian kualitatif ada dua macam informan yaitu informan kunci dan informan biasa.

a) Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapat. Informan kunci dalam penelitian ini Kepala Desa Renda dan Masyarakat yang terlibat konflik.

b) Informan Biasa

Informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Informan biasa dalam penelitian ini merupakan masyarakat mengetahui tentang konflik yang terjadi di Desa Renda.

Dalam penelitian ini guna memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka diperlukan informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan/ permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu persoalan/ permasalahan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memerlukan data yang akurat agar hasil kajian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian, jenis data yaitu data kualitatif [15]. Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa uraian-uraian yang dicatat melalui penelitian sosial melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data menurut jenisnya ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata.
2. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka atau hitungan statistik [16].

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan bukan data kuantitatif, karena tidak berhubungan dengan angka-angka (statistik), namun dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat. Dari jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan secara sistematis, analitis dan logis dari permasalahan.

b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menurut [16] Ada dua sumber data yaitu.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti melalui observasi dan wawancara.
2. Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melalui dokumentasi.

Jika disimak dari keterangan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Kepala Desa Renda dan Masyarakat Desa Renda.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun pihak subjek [10]. Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta sistematis dengan prosedur yang terstandar [12].

Hadi [17] mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi Langsung adalah pada kegiatan observasi langsung, peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di sana. Dengan begitu, peneliti dapat lebih mengenal karakteristik lokasi, fenomena, dan juga subjek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat yang hendak diteliti. Observasi langsung ini dapat kita bedakan atas observasi berperan serta dan observasi tidak berperan serta. Observasi Tidak Langsung adalah observasi tidak langsung merupakan kegiatan pengamatan yang tidak dilakukan pada tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan media, seperti internet, media cetak, rekaman audio visual, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki latar permasalahan yang sama dengan yang akan diteliti [18].

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu bagaimana aspek fisik dari daerah yang diteliti, kegiatan dan interaksi yang terjadi, pelaku yang terlibat dari aktivitas tersebut, serta berapa lama durasi serta frekuensi terjadinya. Peneliti menggunakan observasi langsung (Direct Observation), karena berhubung peneliti bertempat tinggal di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Observasi

yang dilakukan yakni melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut.

b) Teknik Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara [12]. Pendapat lain mengatakan bahwa metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden/ penjawab [19].

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data yang lebih lengkap dan lebih akurat dari responden yang dalam hal ini seluruh pengunjung tempat wisata, maka peneliti memilih metode interview sebagai salah satu metode pengumpulan data. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka [20].

Seluruh wawancara akan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga diharapkan orang-orang yang akan diwawancarai dapat memberikan jawaban secara bebas dan terperinci. Agar proses wawancara tidak terlalu jauh menyimpang dari masalah penelitian yang ditentukan, maka penulis akan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara tersebut, dengan membuat pertanyaan (*guided interview*).

Wawancara terdiri atas beberapa jenis yaitu sebagai berikut.

- 1) Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan seperti menggunakan pedoman wawancara.
- 2) Wawancara semistruktur yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam karena ada perpaduan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah di siapkan dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam dan mengabaikan pedoman yang sudah ada.
- 3) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja [20].

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur karena wawancara bersifat sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam. Wawancara ini memakai kata-kata pertanyaan yang dapat diubah saat wawancara, dengan penyesuaian kebutuhan dan situasi wawancara, dengan catatan tidak menyimpang dari informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari informan guna untuk memperkuat hasil penelitian, wawancara ini dilaksanakan pada saat peneliti turun langsung ke

lapangan (lokasi penelitian). Beberapa informan yang telah diwawancarai pada saat melakukan penelitian, yakni: Bapak Drs. Rusdin HM selaku Kepala Desa, Bapak Amirudin, SH selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Akbar salah satu masyarakat yang berkonflik, Lukman, SE selaku Staf Desa, Rifkan, SE selaku Tokoh Pemuda, Bapak H. Sulaeman S.Pa selaku Tokoh Agama, dan Masyarakat di Desa Renda.

c) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berupa alat untuk mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen, rapat dan agenda [21]. Metode dokumentasi pada dasarnya tidak dapat terlepas dari metode observasi, untuk memperkuat suatu pengamatan perlu didokumentasikan sebagai salah satu data penelitian.

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada [22]. Sedangkan pendapat lain menyatakan 'metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, lentera, agenda dan sebagainya' [12].

Menurut [14] dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk berupa gambar, rekaman wawancara dan lain-lain, profil Desa Renda, Dokumentasi dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh dalam proses pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Menurut Miles dan Huberman dalam [14], mengatidakan bahwa "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh".

Prosedur dan analisis data dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data).

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci serta segera dilakukan analisa. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok/penting sesuai dengan tema penelitian dan membuang hal-hal yang tidak penting atau tidak relevan. Dengan dilakukannya reduksi data, maka diperoleh gambaran yang lebih jelas serta diketahui data-data apa yang masih dibutuhkan atau perlu dilengkapi.

b) *Data Display* (penyajian data).

Data yang ditelaah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, sehingga data tersebut benar-benar dipahami.

c) *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan).

Setelah disajikan dalam bentuk uraian naratif, peneliti membuat kesimpulan awal dari data tersebut. Apabila serangkaian kesimpulan yang dibuat dari setiap aktivitas pengumpulan data menunjukkan adanya suatu konsistensi, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang valid. Sementara untuk memverifikasi data, peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Pemicu Terjadinya Konflik Antar Masyarakat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima

a) Masalah Minuman Keras

Sesungguhnya dibalik berulangnya tindak kekerasan seperti perkelahian antar kelompok antar masyarakat ataupun pemuda yang berujung konflik tersimpan persoalan yang sangat pelik. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kemasyarakatan ataupun saling menghargai satu sama lain.

Tingginya konsumsi minuman keras yang terjadi di Desa Renda, merupakan salah satu factor pemicu terjadinya konflik diantar masyarakat. Minuman keras yang dapat menghilangkan pikiran jernih ataupun memabukkan dapat memicu pertikaian, menyebabkan saling ejek ataupun memukulkan dengan tidak sengaja teman dan munculnya sikap dendam.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Rifkan S.E selaku ketua pemuda:

“Salah satu pemicu terjadinya konflik di Desa Renda ini, yakni tinggi konsumsi minuman keras. Dimana pemuda-pemuda mengonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukkan ditengah-tengah jalan” (Wawancara, 25 November 2016)

b) Komunikasi Yang Kurang Bagus Memicu Sikap Tersinggung

Jangan menganggap sepele komunikasi antar manusia, karena konflik dapat terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi karena dua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka dapat mengakibatkan konflik. Keadaan ini mendorong dua pihak menjadi cemas, mungkin pula takut sehingga mulai bertanya: dia atau saya yang harus lebih dahulu berkomunikasi. Yang masuk dalam

kategori ini adalah konflik makna informasi. Artinya, dua pihak atau lebih member makna yang berbeda secara diametral atas suatu informasi tentang apa yang menjadi sasaran konflik.

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antara kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi antara warga, khususnya anak muda yang mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Rifkan S.E selaku ketua pemuda:

- a. *Terjadinya hiburan malam sehingga senggol menyenggol yang menimbulkan kecemburuan sosial atau kekecewaan antar satu sama lain. Yaitu, menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat sehingga merembek kekeluarganya.*
- b. *Karena adanya balapan liar sepeda motor jadi disitu akan menimbulkan konflik antar masyarakat atau individu, jadi kebanyakan terjadinya konflik itu karena adanya balapan liar sepeda motor dan ketidak sesuaian sampai garis finis maka timbullah cekcokan antara satu sama lain sehingga merembek kemasyarakat atau kekeluarganya.*
- c. *Yaitu, karena pada saat keramean malam masyarakat yang berkelompok melakukan minum minuman keras atau mabuk mabukan pada saat acara keramean malam tersebut, dan disitulah timbulnya konflik antar masyarakat atau antar individu sehingga merembek masyarakat. Jadi disitulah kebanyakan terjadinya konflik dibuat oleh pemuda-pemuda sehingga terbawa kekeluarganya dan menyebab-kan terjadinya konflik antar masyarakat”* (Wawancara, 25 November 2016).

Ketika ada terjadinya konflik dan cara untuk menyelesaikannya, harus ada pendekatan secara emosional terhadap masyarakat yang konflik, secara kekeluargaan pasti bisa terselesaikan baik-baik dan kami juga pernah melakukan terdahulu bahwa kami mampu menyelesaikan perkelahian atau konflik antar masyarakat itu sendiri.

Kalau berbicara kenapa seringkali terjadi konflik antar masyarakat di desa renda karena memang ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikannya sangat minim atau masyarakatnya sangat awam sekali, karena memang masyarakat renda mayoritas petani jadi moral, etika, norma-normanya masih sangat minim sekali sehingga

pemahaman mereka tidak ada yang sesuai antar satu sama lain.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rusdin HM selaku Kepala Desa Renda, menuturkan bahwa.

“Anak muda sekarang itu cepat sekali tersinggung, karena tidak baiknya komunikasi di antara mereka sehingga menimbulkan prasangka, dan mengakibatkan ketersinggungan” (Wawancara, 21 November 2016).

Cara untuk meminimalisir konflik antar masyarakat itu sendiri ada banyak hal yang kami lakukan untuk mencegah atau menghindari terjadinya konflik antar masyarakat di Desa Renda. Yaitu, gotong royong lingkungan, pembersihan mesjid, kuburan, dan ada juga kegiatan permainan sepak bola mini, dll.

c) Adanya hiburan malam

Memang ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terjadinya konflik dan faktor tersebut adalah keramaian malam atau hiburan malam (orghen) pada beberapa bulan yang lalu dan anak-anak muda mengajukan dan meminta terhadap pak kepala desa renda agar semestinya keramaian malam atau hiburan malam (orghen) tersebut harus dilakukan pada saat malam hari, sehingga permintaan anak-anak muda untuk keramaian malamnya (orghen) diberikan pengijinan oleh pak kepala desa renda dan ternyata pada saat keramaian malam (orghen) namun terulang kembali konflik antar individu, pemuda, kelompok, dan antar masyarakat.

Pada saat ada acara joget tim pelaksana keramaian malam (orghen) memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk masuk berjoget satu persatu akan tetapi mereka tidak memanfaatkan demi kabaikannya melainkan mereka masuk untuk berjoget secara berkelompok, dan yang sebenarnya kenapa diberikan kesempatan untuk masuk berjoget satu persatu atau bergiliran supaya menghindari terjadinya konflik akan tetapi karena tidak adanya kesadatan dari masyarakat maka timbullah konflik antar masyarakat, dan keramaian malam itu juga di jadikan ajang perjudian disekitar tempat keramaian malam (orghen) itu sendiri dan disitulah timbulnya konflik karena bandar bola adil tidak mau menerima kealahannya dan ada juga peranguh terjadinya konflik dari sabu ayam, ini bukan bermaksud untuk menjelekan desa kami sendiri akan tetapi ada juga orang lain selain dari pada masyarakat desa renda itu sendiri.

Wawancara dengan Bapak H. Sulaeman S.Pa selaku tokoh agama Desa Renda menuturkan bahwa:

“Sebenarnya semua aparat desa dan tokoh-tokoh yang ada di dalam desa renda

itu harus dalam melakukan penyelesaian konflik antar masyarakat itu sendiri dan rana hukum nasionalpu harus berpartisipasi atau aparat kepolisian juga harus ikut terlibat dalam pengaman ketika terjadinya konflik antar masyarakat tersebut, dan jikalau semuanya ikut terlibat untuk menangani terjadinya konflik itu insaallah pasti semuanya akan teratasi sampai tuntas dan mampu di minimalisir karena persoalan konflik itu tidak boleh kita lepas tangan dan bukan saja kita serahkan hanya kepada kepala desa akan tetapi seluruh komponen harus ikut berperang maupun ketua rt, rw, kepala dusun, kepala desa, lain dan sebagainya termasuk juga orang tua yang lebih terutama berperang untuk memberikan didikan khusus terhadap anak didiknya” (Wawancara, 25 November 2016).

Pencegahan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama yang tidak semestinya dilakukan oleh masyarakat desa renda dibalik itu kurangnya nilai moral, estetika dan norma-norma agamanya, jadi hal-hal yang kami takutkan nantinya akan berpengaruh terhadap generasi penerus maka kami sebagai tokoh agama melakukan pencegahan dalam hal-hal kemudian yang sudah terjadi.

2. Peranan Kepala Desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar masyarakat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Peran kepala desa Renda dalam menyelesaikan konflik antar warga desa masih dirasakan belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Untuk dapat mengatasi konflik-konflik yang ada dimasyarakat desa, kepala desa harus melakukan mediasi dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi-kondisi penting yang diinginkan, yang menurut persepsi masing-masing harus dipenuhi dengan pemanfaatan berbagai sumber daya dan dana yang tersedia. Meminta satu pihak menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan argumentasi kuat mengenai posisi tersebut. Kemudian posisi peran itu dibalik, pihak yang tadinya mengajukan argumentasi yang mendukung suatu gagasan seolah-olah menentangnya, dan sebaliknya pihak yang tadinya menentang satu gagasan seolah-olah mendukungnya. Setelah itu tiap-tiap pihak diberi kesempatan untuk melihat posisi orang lain dari sudut pandang pihak lain.

Kewenangan kepala desa sebagai sumber kekuatan yang bertugas memimpin suatu masyarakat, untuk mengambil suatu keputusan, atau memecahkan masalah secara efektif, perlu memiliki kemahiran menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada perannya dan itulah tugas pemimpin yang dalam hal ini adalah kepala

desa yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu konflik dengan cara mediasi. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian konflik. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian konflik mereka.

Dalam hal ini permasalahan berikunya adalah ketika berkonflik masyarakat setempat biasanya lari ke ketua adat, kepala desa atau sesepuh desa. Namun dikarenakan mereka merupakan perorangan, maka seringkali kendala-kendala penyelesaian konflik terjadi misalnya.

- a. Ketidapkahaman terhadap mediasi dan proses mediasi dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian konflik yang dihadapi.
- b. Kepentingan perorangan sering kali menghalangi cepatnya penyelesaian konflik yang terjadi.
- c. Belum adanya lembaga khusus pengaduan konflik di desa atau kelurahan setempat. konflik yang umumnya terjadi pada masyarakat desa adalah masalah pertanahan, konflik keluarga ataupun lainnya. Oleh karena adanya beberapa hambatan dalam penyelesaian konflik yang dilakukan perorangan, oleh karena itu sebaiknya harus ada lembaga khusus yang menjadi lembaga pengaduan konflik masyarakat. Lembaga ini sebaiknya terdiri dari gabungan dari kepala desa, perangkat desa, sesepuh dan tokoh masyarakat.

Pembentukan lembaga ini berdasarkan rapat desa yang melibatkan seluruh kepala jaga, serta masyarakat pada umumnya. Lembaga ini didasarkan pada aturan yang jelas sehingga pembentukannya nanti bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni membantu penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini diberikan penjelasan singkat mengenai pembentukan lembaga mediasi desa. Kurangnya pengenalan mengenai anger manajemen bagi kepala desa. Anger management merupakan suatu jenis pengontrolan emosi bagi pihak yang menjadi mediator. Dalam prakteknya seringkali mediator sendiri menjadi terpancing emosi dikarenakan tingkah laku dari para pihak. Dalam kegiatan penyuluhan ini diberikan pelatihan singkat bagaimana mengontrol amarah dan emosi dalam proses mediasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 BAB III Pasal 6 Mengenai Pencegahan Konflik dilakukan dengan Upaya:

1. pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya;
2. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
3. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
4. meredam potensi Konflik; dan
5. membangun sistem peringatan dini.

6. pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rusdin HM selaku Kepala Desa Renda, menuturkan bahwa.

“Posisi saya dalam konflik ini saya tidak mendukung salah satu dari pihak yang berkonflik dan saya juga tidak pernah menekan salah satu dari pihak yang berkonflik agar mereka menuruti kata-kata saya, apa yang dapat saya lakukan untuk mendamaikan masalah ini saya lakukan. Tugas saya sebagai Kepala Desa dan aparat pemerintah di Desa Renda ini memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan perkara ini agar tidak berkelanjutan. (Wawancara, 21 November 2016).

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa posisi Kepala Desa dalam menangani permasalahan ini netral tapi lemah dalam menghadapi permasalahan ini karena dari pihak Pemerintah tidak pernah ingin mencari tahu permasalahan yang sebenarnya dan kronologi dari permasalahan tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Renda bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda yang berkonflik dibantu oleh tokoh masyarakat setempat serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara musyawarah/ mufakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Rusdin HM selaku Kepala Desa Renda.

“Kita sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan para pemuda dengan musyawarah dan mufakat di tempat kejadian dimana tempat mereka berkelahi” (Wawancara, 21 November 2016).

Hal ini juga dibenarkan Bapak Sahrudin selaku salah tokoh masyarakat di Desa Renda, menuturkan bahwa:

“Setiap kita adakan perdamaian, kita melakukan musyawarah atau mufakat ataupun dengan menyembelih kambing atau untuk di makan bersama, sebagai tanda bahwa pemuda Desa Renda sudah berdamai” (Wawancara, 26 Januari 2016).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah kecamatan, Bapak Drs. Rusdin HM selaku Kepala Desa Renda dan Bapak Sahrudin selaku salah tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para pemuda yang bertikai atau berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, yang mana mampu meredam munculnya kembali konflik. Terbukti setelah

beberapa kali mereka berdamai, akan tetapi mereka kembali berkonflik.

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah belum begitu maksimal dalam menyelesaikan konflik tersebut, terbukti bahwa pemuda Desa Renda masih saja terus berkonflik. Secara khusus ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial.

a) Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Konsiliasi (*conciliation*) adalah suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Pada umumnya, bentuk konsiliasi terjadi pada masyarakat politik. Lembaga parlementer yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok kepentingan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, biasanya lembaga ini melakukan pertemuan untuk jalan damai. Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rusdin HM selaku Kepala Desa Renda menuturkan bahwa:

“Saya selaku kepala Desa melakukan pendekatan kepada pihak yang berkonflik untuk dapat membicarakan dengan permasalahan yang dihadapi dan saya mengusahakan untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk pembicaraan lanjut mengenai konflik yang dihadapi” (Wawancara, 21 November 2016)

b) Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka.

Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Renda bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda yang berkonflik serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara musyawarah/mufakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Rusdin HM selaku Kepala Desa Renda menuturkan bahwa:

“Saya sudah beberapa kali mengadakan perdamaian dengan mempertemukan para pemuda dengan musyawarah dan mufakat

di tempat kejadian dimana tempat mereka berkelahi” (Wawancara, 21 November 2016).

Hal ini juga dibenarkan oleh Hal ini juga dibenarkan Bapak Sahrudin selaku salah tokoh masyarakat di Desa Renda, menuturkan bahwa, menuturkan bahwa:

“Setiap kita adakan perdamaian, kita melakukan musyawarah/ mufakat ataupun dengan menyembelih kambing atau untuk di makan bersama, sebagai tanda bahwa pemuda Desa Renda sudah berdamai” (Wawancara, 26 November 2016).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, Kepala Desa Renda dan tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para pemuda yang bertikai atau berkonflik, akan tetapi perdamaian yang mereka lakukan hanya sebatas perdamaian saja, karena belum ada hasil yang maksimal, yang mana mampu mereda munculnya kembali konflik.

c) Menjadi penengah diantara dua kelompok yang berkonflik

Hal yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan oleh kepala Desa Renda yaitu, melakukan mediasi, negosiasi, dan memfasilitasi para pemuda yang terlibat konflik. Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rusdin HM selaku Kepala Desa Renda menuturkan bahwa:

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara mediasi. Kita memediasi para pemuda pelaku konflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah kedua desa yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mediasi, kita juga melakukan negosiasi dan memfasilitasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini kembali aman seperti sedia kala” (Wawancara, 21 November 2016)

Hasil wawancara yang didapatkan dari informan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepala Desa, tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Pemerintah sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun terkadang memang upaya-upaya yang pemerintah lakukan masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Alhasil kini daerah yang dulunya sering berkonflik, kini sekarang sudah berangsur-angsur aman. Ini semua tidak lepas dari usaha dan kerja keras dari pemerintah setempat yang terus gigih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

D. TEMUAN DAN DISKUSI

Tingginya konsumsi minuman keras yang terjadi di Desa Renda, merupakan salah satu factor pemicu terjadinya konflik diantar masyarakat. Minuman keras yang dapat menghilangkan pikiran jernih ataupun memabukkan dapat memicu pertikaian, menyebabkan saling ejek ataupun memukul dengan tidak sengaja teman dan munculnya sikap dendam. Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antara kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Pencegahan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama yang tidak semestinya dilakukan oleh masyarakat desa renda dibalik itu kurangnya nilai moral, estetika dan norma-norma agamanya.

Dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 dalam pasal 7 ayat 3, bahwa penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesucilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Renda pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah Desa memanggil para pelaku atau aktor dari konflik yang terjadi. Alasannya agar permasalahan ini diketahui penyebab dari masalah tersebut sehingga terjadi konflik yang begitu serius.

Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Pada umumnya, bentuk konsiliasi terjadi pada masyarakat politik. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Pembentukan lembaga ini berdasarkan rapat desa yang melibatkan seluruh kepala jaga, serta masyarakat pada umumnya. Lembaga ini didasarkan pada aturan yang jelas sehingga pembentukannya nanti bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni membantu penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini diberikan penjelasan singkat mengenai pembentukan lembaga mediasi desa. Kurangnya pengenalan mengenai anger manajemen bagi kepala desa. Anger management merupakan suatu jenis pengontrolan emosi bagi pihak yang menjadi mediator.

Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Renda bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda yang berkonflik serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara

musyawarah/mufakat. Pemerintah sudah sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, walaupun terkadang memang upaya-upaya yang pemerintah lakukan masih kurang menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Alhasil kini daerah yang dulunya sering berkonflik, kini sekarang sudah berangsur-angsur aman. Ini semua tidak lepas dari usaha dan kerja keras dari pemerintah setempat yang terus gigih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jadi adapun usaha-usaha penyelesaian atau resolusi konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa antara lain konsolidasi, mediasi, menjadi penengah diantara dua kelompok yang berkonflik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat bahwa penyelesaian dapat dilakukan dengan cara melakukan Negosiasi; Kosultasi; Mediasi; dan terakhir Arbitrasi[8]. Demikian pendapat lainnya menguraikan lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan: a). Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada). b). Diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. c). Menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. d). Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian[9].

Dalam UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemda dan masyarakat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemicu terjadinya konflik antar masyarakat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, antara lain; 1) kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah minuman keras. 2) komunikasi yang kurang sehingga kerap terjadi Ketersinggungan. 3) adanya hiburan malam.

Peranan kepala desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi antar masyarakat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Peranan pemerintah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang

berkonflik dimana mereka dapat menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi sebanyak-banyaknya dari masing-masing pihak yang berkonflik. Melakukan konsolidasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yang berkonflik. Menjadi kelompok penengah di acara kedua pihak yang bertikai yakni mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

Adapun saran yang disampaikan penulis kesemua pihak adalah a) Untuk kepala desa Renda, agar meningkatkan koordinasi antar warga secara rutinitas supaya terjalin suatu hubungan yang erat antara pimpinan dengan bawahan. Bagi semua pihak yang membaca tulisan ini dapat dijadikan acuan dan bahan referensi penelitian lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UM Mataram yang senantiasa memberikan dukungan dana kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] W. Kornblum, *Sociology in a changing world*. Nelson Education, 2011.
- [2] J. Gibson, "L., 2006, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5," *Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga*.
- [3] F. Yanti and E. Amaliah, "Social Communication In Building Religious Spirituality: Study of Flaming South Lampung," *Al-Tahrir J. Pemikir. Islam*, vol. 18, no. 2, pp. 469–487, 2018.
- [4] B. M. St Aisyah, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama," *J. Dakwah Tabligh*, vol. 15, no. 2, pp. 189–208, 2014.
- [5] T. Galang, "Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Antar Masyarakat di Desa Lemoh Kecamatan Tombariri Timut," *J. Eksek.*, vol. 1, no. 7, 2016.
- [6] S. Fisher, "dkk. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak, Cetakan Pertama, Alih Bahasa SN Kartikasari, dkk," *Br. Counsil, Indones. Jakarta*.
- [7] R. Indonesia, "Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial," *Jakarta Kementerian. Inf. dan Komun. Republik Indones.*, 7AD.
- [8] I. Irwandi and E. R. Chotim, "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta," *JISPO J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 7, no. 2, pp. 24–42, 2017.
- [9] M. Muspawi, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)," *J. Penelit. Univ. Jambi Seri Hum.*, vol. 16, no. 2, 2014.
- [10] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [12] A. Suharsimi, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006.
- [13] S. Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan." Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2014.
- [15] A. Suharsimi, "Prosedur Penelitian, Jakarta: PT," *Rineka Cipta*, p. 201:274, 2013.
- [16] M. B. A. Riduwan, "Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian," *Alf. Bandung*, 2007.
- [17] Sugiyono, "Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D," *Alf. Bandung*, 2010.
- [18] H. Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial. (cetakan ke-13)," *Gajah mada Univ. Press. Yogyakarta*, hal, vol. 176, 2012.
- [19] D. K. Sukardi, *Pengantar pelaksanaan program bimbingan dan konseling disekolah*. Rineka Cipta, 2000.
- [20] A. Soebani and B. Ahmad, "Metode Penelitian Kualitatif," *Bandung, Pustaka Setia*, 2012.
- [21] A. Suharsimi, "Prosedur Suatu Pendekatan Praktek," *Jakarta PT. Rineka Cipta*, 2006.
- [22] Y. Riyanto, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif." Surabaya: Unesa university press, 2007.